BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris. Julukan ini kerapkali kita dengar dari guru di sekolah-sekolah baik itu dari tingkat dasar hingga menengah. Tidak saja menjadi perbincangan antara murid dan guru di sekolah, tetapi rupanya julukan yang dilekatkan pada bangsa Indonesia itu menjadi kebanggaan pula bagi masyarakatnya. Hal ini tidak saja menjadi julukan dan kebanggaan belaka, tetapi bangsa Indonesia membuktikan dengan tingginya angka okupasi masyarakat dalam sektor pertanian.

Tabel 1.1
Jumlah Rumah Tangga Pertanian pada Sensus Pertanian 1993[1]

Uraian	Jawa	Luar Jawa	Indonesia
Jumlah Rumah Tangga (RT)	26.271	15.847	42.117
Jumlah RT Pertanian	11.671	9.811	21.482
Jumlah RT Non-Pertanian	14.599	6.036	20.635

Sumber: Diolah dari sensus Pertanian 1993, dalam Loekman Soetrisno (2002).

Selain pertumbuhan angka kerja dalam bidang pertanian, konsistensi pemerintah dalam menanggapi beragam hal yang berkaitan dengan pertanian pun menjadi indikator penopang Indonesia sebagai negara agraris. Beragam upaya dialakukan pemerintah untuk memajukan usaha sektor pertanian. Dalam artikel "Benih Bersertifikat Basis Swasembada Beras" yang ditulis MT Felix Sitorus dalam

[1] Lihat Loekman Sutrisno, 2002, *Paradigma Baru Pembangunan Pertanian Sebuah Tinjaun Sosiologis*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 4.

Suara Pembaruan (21/8/2009) usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan pertanian diantaranya Balai Pendidikan Masyarakat Desa (1945-1959), Komando Operasi Gerakan Makmur (1959-1963), Panca Usaha Tani Lengkap (1963-1970), "Revolusi Hijau" (1971-1980). Selain itu, pemerintah pun membentukan sistem perbenihan nasional yaitu BNN, LP3 Sukamandi, Dinas Pengawasan dan Sertifikasi Benih, dan Perum Sang Hyang Seri. Program-program yang disebutkan tadi dapat dimaknai sebagai keseriusan pemerintah terhadap pertanian.

Berkat keseriusan dari pemerintah dan keuletan para petani Indonesia, pada tahun 1984 untuk pertama kalinya negara ini swasembada beras nasional. Prestasi ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri untuk bangsa Indonesia, khususnya para petani. Buah perjuangan ini semakin menegakan Indonesia sebagai negara agraris. Namun, rupanya perkembangan dunia mampu melunturkan keyakinan Indonesia untuk menjadi negara agraris. Industrialisasi menjelang abad 21 mampu menggeser paradigma usaha sektor pertanian. Peristiwa ini cukup menjadi pukulan yang keras bagi usaha sektor pertanian.

Perubahan paradigma bangsa Indonesia dari pertanian menjadi industri berdampak pula pada paradigma masyarakat. Perubahan ini dapat dilihat dari pandangan mereka mengenai sekolah, pekerjaan, dan keberhasilan. Perubahan paradigma ini tidak terkecuali terjadi pada anak-anak petani. Jika sebelumnya mereka diperkenalkan dan dipersiapkan untuk melanjutkan usaha orang tuanya, yakni bertani, namun dengan perubahan tersebut ada kecenderung untuk mencari pekerjaan

baru. Pekerjaan yang diminati tentu dalam bidang non-pertanian. Sehingga, usaha sektor pertanian cenderung untuk ditinggalkan.

Selain paradigma industrialisasi, kurangnya motivasi dan pembelajaran yang diberikan agen-agen sosialisasi pada mereka pun menjadi faktor pendukung bergesernya minat bertani mereka. Pemerintah yang pada awalnya menjadi tumpuan pertanian, setelah masuknya perindustrian malah cenderung kurang bijaksana. Kebijakan pembangunan industri yang dikeluarkan pun dinilai tidak tepat, karena industri yang dikembangkan sendiri bukan pada sektor pertanian, tetapi lebih besar diluar sektor itu. Alhasil, sektor pertanian pun kian terpuruk. Meskipun hal ini terlihat wajar bagi negara berkembang yang bertransisi menjadi negara industri, namun di sisi lain menjadi cukup krusial untuk diatasi dan pada akhirnya berdampak sistemik.

Dapat diperhitungkan bahwa keberadaan agen sosialisasi sebenarnya bisa menekan segregasi pertanian. Keberadaannya dapat menjadi pupuk bagi tumbuh suburnya pertanian di masyarakat. Bukan tidak mungkin, dengan adanya agen sosialisasi paradigma industri yang terlanjur dianut oleh masyarakat belakangan, bisa berputar seratus delapan puluh derajat kembali pada pertanian. Sayangnya, agen-agen sosialisasi pertanian formal di masyarakat terbilang minim. Selain itu, keluarga sebagai agen sosialisasi utama cenderung lebih senang mengajarkan pada generasi mudanya nilai-nilai non pertanian. Asumsi pertanian sebagai lahan pekerjaan atau sektor perekonomian terjustifikasi sebagai sesuatu yang kolotan. Pertanian dianggap memiliki tendensi menghalangi tumbuh kembangnya industri modern. Dengan persepsi demikian, bertani sebagai sistem belajar asli masyarakat, khususnya di

Indonesia, lambat laun pun tersingkirkan. Padahal, anggapan ini terlalu sederhana dan cukup membahayakan regenerasi petani. Menurut Mohamad Zen "memahami akan keberadaan sistem belajar asli dalam masyarakat tradisional tidak berarti surut kebelakang pada dimensi nilai budaya asli yang kontradiktif dengan kehidupan modern."[2] Jadi, memahami dan menggeluti usaha pertanian saat ini bukan berarti kita surut menjadi manusia tradisional. Pemaknaan terhadap pertanian justru dapat dikembangkan beriringan dengan kehidupan masa kini.

Meskipun demikian, pemerintah tidak juga lepas tangan dalam menangani sektor pertanian. Munculnya lembaga penyuluhan pertanian yang digagas oleh pemerintah memiliki dampak yang cukup signifikan dalam mengembangkan pertanian. Balai penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan (BP3KKP) adalah salah satu lembaga penyuluhan pertanian yang bernaung di bawah Kementrian Pertanian. Secara garis besar lembaga ini bertugas dalam menyosialisasikan pertanian kepada warga masyarakat. Keberadaan lembaga ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi pemerintah untuk menumbuhkan kembali dan memajukan sektor pertanian.

Lebih lanjut, lembaga ini merupakan agen pemberdayaan masyarakat. Penyuluhan yang dilakukan oleh BP3KKP dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perubahan pola pikir masyarakat dalam memaknai kesejahtraan hidup setidaknya menjadi target awal dari hasil penyuluhan. Mengacu pada Pertimbangan Presiden Republik Indonesia poin A dalam undang

[2] Mohamad Zen, 2002, *Orang Laut: Studi Etnopedagogi*, Jakarta: Yayasan Bahari Nusantara, hlm. 81.

undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan bahwa "penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia; suatu keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat."[3] Dengan demikian, perubahan pola pikir tersebut semakin mendapat dukungan untuk direalisasi. Modal yang telah didapat dari hasil penyuluhan kurang lebih bisa dijadikan pijakan untuk meningkatkan kesejateraan mereka.

Dalam meningkatkan kesejahtraan masyarakat, dalam hal ini petani, BP3KKP membentuk peningkatan sumber daya manusia (SDM). Upaya ini sebagai respon dari perubahan sosial politik yang terjadi di masyarakat. Globalisasi, modernisasi, demokratisasi, desentralisasi, hingga pembangunan berkelanjutan menjadi isu-isu penting yang sewajarnya dapat diadaptasi masyarakat kekinian. Isu-isu tersebut akan mempengaruhi daya saing mereka dalam segala bidang, terutama pekerjaan. Ketika SDM suatu masyarakat rendah, maka lambat laun mereka akan tergerus oleh kelompok-kelompok yang memiliki SDM tinggi. Kurang handalnya masyarakat yang ber-SDM rendah dalam menghadapi kemajuan, misalnya teknologi, menyebabkan tersingkirnya mereka dari ranah persaingan. Tidak berkembangnya SDM masyarakat sama dengan meningkatkan hegemoni masyarakat yang ber-SDM tinggi. Oleh sebab itu, BP3KKP berusaha untuk meningkatkan SDM demi meratakan kemampuan responsif masyarakat terhadap perubahan.

---

[3] http://feati.deptan.go.id/dokumen/uu_sp3k.pdf, diakses pada 22 Januari 2012 Jam 11.01 WIB.

Begitu pun upaya yang dilakukan oleh BP3KKP Kecamatan Purwadadi. Lembaga ini merupakan salah satu agen perubahan sosial masyarakat di kecamatan tersebut. Dengan mayoritas pertanian sebagai matapencaharian masyarakatnya, BP3KKP Kecamatan Purwadadi memberikan beragam penyuluhan terkait dengan pekerjaan tersebut. Lembaga ini mengurusi kurang lebih "14.008 para petani yang tersebar di 10 desa binaan yang ada di Kecamatan Purwadadi."[4] Konteks pertanian yang diurusi oleh BP3KKP Kecamatan Purwadadi adalah mencakup persawahan, perkebunan, perikanan, kehutanan dan kesejahtraan masyarakat melalui ketahan pangannya.

Dalam menyampaikan informasi pembangunan, khususnya dalam sektor pertanian, BP3KKP Kecamatan Purwadadi memiliki beberapa program. Program tersebut dirancang sebagai inovasi dalam mengembangkan usaha sektor pertanian masa kini. Salah satu program yang relatif berhasil di masyarakat adalah sekolah lapang pengelolan tanaman terpadu (SL-PTT). Pogram ini merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman, padi khususnya, dengan cara melakukan prosedur penanaman sesuai anjuran. Di SL-PTT ini, para petani dapat belajar bagaimana cara bercocok tanam yang baik dan benar.

Salah satu desa binaan dari BP3KKP Kecamatan Purwadadi adalah Panyingkiran. Desa ini merupakan desa yang tergolong sukses dalam mengadopsi informasi dan inovasi yang disuluhkan oleh lembaga tersebut. Kesuksesan ini dapat dilihat dari berkembangnya desa tersebut dalam sektor usaha pertaniannya. Beragam

[4] Program Penyuluhan Pertanian BP3KKP Kecamatan Purwadadi Tahun Anggaran 2011.

kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan pertanian, studi banding, seringkali dilaksanakan di desa ini. Cakupan kegiatan ini tidak hanya berskala lokal, tetapi internasional. Selain itu, suksesnya desa ini dalam beragam perlombaan sektor pertanian pun menjadi pertanda berjalannya adopsi masyarakat terhadap informasi dan inovasi yang disosialisasikan oleh BP3KKP Kecamatan Purwadadi .

Deskripsi di atas ingin menunjukan bagaimana pertanian telah mengalami pergolakan. Kebanggaan hingga kecenderungan untuk meninggalkan pertanian sebagai matapencaharian masyarakat menjadi masalah yang patut menjadi sorotan. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut layak untuk ditelusuri. Mengingat, pertanian sendiri pernah membesarkan bangsa Indonesia. Selain itu, deskripsi di atas pun menjelaskan bagaimana peran BP3KKP sebagai lembaga penyuluhan dalam menyikapi perubahan yang terjadi di masyarakat. BP3KKP menjadi pihak yang memiliki peranan dalam memberdayakan masyarakat, dalam hal ini adalah petani. Alasan ini setidaknya cukup menjadi motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

B. Permasalahan Penelitian

Sejalan dengan industrialisasi yang gencar merebak kepedesaan, lambat laun dampaknya dirasakan juga oleh sektor pertanaian. Melonjaknya pembangunan pabrik-pabrik industri di derah pedesaan menggeser sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat. Yang menarik, pergeseran ini tidak semata-mata akibat dari munculnya industrialisasi di desa saja. Kemunduran pertanian di daerah pedesaan disebabkan pula oleh kurangnya perhatian masyarakat akan kelangsungan

pertanian itu sendiri. Masyarakat menilai bahwa pertanian sudah tidak lagi ideal untuk menjadi sumber nafkah kekinian. Persepsi masyarakat tentang industri berpengaruh pula pada pola sosialisasi pertanian masyarakat. Pasang surutnya pertanian sebagai matapencaharian, memberikan gambaran penting atau tidaknya pertanian bagi masyarakat tersebut.

Hadirnya BP3KKP ini menjadi salah satu solusi untuk mengembalikan citra pertanian di daerah. Selain sebagai agen sosialisasi pertanian, lembaga ini pun menjadi motor mobilitas sosial masyarakat. Gagasan atau temuan-temuan baru yang menjadi program pemerintah disampaikan melalui lembaga ini. Khususnya sektor agraria, lembaga ini berpengaruh penting dalam mengubah paradigma dan penerapan cara-cara bertani baru pada masyarakat. Hal-hal baru yang menjadi program pertanian pemerintah, melalui lembaga ini disosialisasikan kepada para petani. Dengan kata lain, lembaga ini menjadi ujung tombak suksesnya program-program pertanian pemerintah pusat. Dalam perkembangannya, peranan BP3KKP menjadi sangat penting bagi keberlanjutan pertanian. Munculnya gaya bertani baru pada masyarakat tidak terlepas dari campur tangan lembaga ini.

Panyingkiran yang merupakan salah satu desa binaan dari BP3KKP dapat menjadi tempat yang cocok untuk mengetahui bagaimana peranan lembaga tersebut bekerja. Mengingat, desa tersebut merupakan yang terbaik diantara 10 desa lainnya di Kecamatan Purwadadi dalam merespon upaya pemberdayaan pemerintah, terlebih bidang pertanian. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana peran BP3KKP dalam menyosialisasikan dan memberdayakan masyarakat (petani) Desa Panyingkiran,

dalam riset ini peneliti akan coba menggalinya melalui beberapa pertanyaan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan memperjelas penjabaran dan fokus bahasan dalam penelitan ini. Adapun pertanyaan yang di ajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana BP3KKP Kecamatan Purwadadi melakukan penyuluhan pada masyarakat petani Desa Panyingkiran?
2. Bagaimana peran BP3KKP Kecamatan Purwadadi dalam memberdayakan masyarakat petani Desa Panyingkiran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu, (1) ingin mengetahui peran BP3KKP Kecamatan Purwadadi dalam memberdayakan masyarakat petani Desa Panyingkiran. Peneliti akan memaparkan bagaimana peran BP3KKP sebagai pihak yang melakukan penyuluhan pertanian terhadap masyarakat Panyingkiran dalam rangka memberdayakan mereka. (2) Mencoba menjelaskan proses penyuluhan yang dikembangkan BP3KKP Kecamatan Purwadadi pada masyarakat petani Desa Panyingkiran. Setelah melihat bagaimana peran BP3KKP dalam memberdayakan masyarakat Panyingkiran, selanjutnya peneliti coba merunut bagaimana proses penyuluhan yang dikembangkan oleh lembaga tersebut. Dengan menjelaskan proses penyuluhan tersebut, kita bisa melihat seperti apa hasil yang dicapai.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini yaitu mencoba mendalam bagaiamana proses penyuluhan yang dilakukan oleh suatu lembaga penyuluhan pertanian milik pemerintah pada suatu masyarakat desa. Secara sempit lingkup yang disoroti adalah bagaimana petani dan pertanian diberdayakan oleh lembaga penyuluhan pertanian (BP3KKP) melalui program yang dimilikinya. Dengan menyoroti hal tersebut, penelitian ini bisa menggambarkan sejauh mana petani dan pertanian, dalam hal ini pada masyarakat Desa Panyingkiran, bisa berdaya.

Demikian juga, diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan diskusi dan masukan bagi mahasiswa yang hendak mengkaji lebih lanjut tentang penyuluhan pertanian. Penelitian ini setidaknya dapat memberikan gambaran bagaimana peran balai penyuluhan pertanian (BP3KKP) melakukan pembinaan pada masyarakat tani di pedesaan. Selain itu, penelitian ini pun bisa menjadi informasi pemberdayaan masayarakat desa, khususnya di Desa Panyingkiran, dalam bidang pertanian.

E. Tinjauan Penelitian Sejenis

Kajian pertanian dari kacamata sosiologis dapat dikatakan masih perlu diperkaya. Meskipun telah berkembang sosiologi pertanian, tetapi kebanyakan bahasan pertanian ini masih terintegrasi dalam kajian pedesaan. Lebih-lebih, pembahasan mengenai peran BP3KKP masih sangat minim dalam pembahasan ilmiah. Padahal, lembaga ini memiliki peran penting dalam mengembangkan pertanian. Untuk itu, peneliti disini mencoba mengangkat penelitian tentang peran

balai penyuluhan pertanian dalam meningkatkan kesejahtaran masyarakat. Agar penelitian ini nantinya bisa terarah dengan baik, peneliti akan sedikit membuat perbandingan dengan penelitian sejenis.

Kajian penelitian sejenis pertama yaitu disertasi Joice M.J. Supit sebagai syarat mendapatkan gelar Doktor. Dalam risetnya, ia memfokuskan kajiannya kepada kinerja penyuluh pertanian lapangan (PPL). Dengan menggunakan studi kuantitatif, dia mencoba mengkorelasikan antara kinerja PPL dengan ketiga variabel yang dapat mempengaruhinya. Ketiga variabel tersebut yaitu pengetahuan penyuluh, motivasi kerja, dan kualitas komunikasi. Dari ketiga variabel di atas, didapat suatu kesimpulan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara ketiganya dengan kinerja penyuluh. Di mana, dapat dideskripsikan satu persatu hasil dari hubungan variabel-veriabel tersebut.

> *Pertama,* hubungan antara pengetahuan penyuluh dengan kinerja PPL. Dari hasil penelitian, terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan menyuluh PPL dengan kinerja PPL pada BPP di kabupaten Minahasa. Artinya, makin tinggi pengetahuan menyuluh seorang PPL maka makin baik kinerja PPL yang bersangkutan. Begitupun sebaliknya, makin rendah pengetahuan PPL, makin rendah pula kinerjanya. Dengan kata lain, pengetahuan menyuluh PPL mempunyai konstribusi terhadap tinggi rendahnya kinerja PPL. *Kedua,* hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja PPL. Hasil riset menunjukan, bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi kerja PPL dengan kinerja PPL pada BPP Minahasa. Artinya, makin kuat motivasi kerja PPL dalam melaksanakan kegiatan yang dibebankan lembaga kepadanya, makin baiklah kenirja PPL tersebut. Begitu sebaliknya, makin lemah motivasi kerja PPL, maka makin rendah pula kinerjanya. *Ketiga,* hubungan antara kualitas komunikasi PPL dengan kinerja PPL. Ditarik suatu kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan positif dan signifikan antara kulitas komunikasi PPL dengan kinerja PPL pada BPP Minahasa. Maksudnya, makin tinggi kualitas komunikasi seorang PPL dalam melaksanakan tugasnya maka makin baiklah kinerjanya. Sebaliknya, makin rendah kualitas komunikasi seorang PPL maka makin rendah pula kinerja PPL itu. Dengan kata lain

kualitas komunikasi PPL mempunyai kontribusi terhadap tinggi rendahnya Kinerja PPL. [5]

Dari penjabaran penelitian di atas, secara objek penelitian terdapat kedekatan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Hanya saja, kedekatan ini dibatasi oleh cakupan luas wilayah dari objek penelitian dan lokasi penelitian. Jika Supit mengambil objek penelitian yaitu Balai Penyuluh pertanian ditingkat kabupaten (Minahasa), peneliti mencoba terfokus pada Balai penyuluhan pada tingkat kecamatan (Purwadadi). Namun, peneliti rasa meski berbeda secara cakup wilayah penelitian dan lokasi riset pada umumnya penelitian kami memiliki kedekatan yaitu sama-sama menjadikan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai objek riset.

Perbedaan yang mendasar antara keduanya terletak pada cara riset dan fokus kajian penelitian. Jika pada fokus penelitian Supit dilihat bagaimana kinerja PPL dengan mengkorelasikannya pada variabel-variabel tertentu, lain hal dengan riset yang dilakukan peneliti. Pada riset peneliti, metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Dengan menggunakan metode ini, hasil yang didapat lebih mendalam. Faktor-faktor kecil yang terabaikan oleh studi kuatitatif, dapat terlihat dalam penelitian ini. Selain itu, fokus penelitian yang dikaji peneliti adalah penyuluhan dari Balai Penyuluhan Pertanian dalam suatu masyarakat. Dalam penyuluhan tersebut, peneliti melihat peran dari lembaga itu dalam memberdayakan masyarakat tani. Hal inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara keduanya.

---

[5]Joice M.J. Supit, 2010, *Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan Pada Balai Penyuluhan Pertanian Di Kabupaten Minahasa*, Disertasi Prorgram Pascasarjana UNJ.

Pustaka sejenis kedua yaitu tentang peranan organisasi dalam menciptakan masyarakat peduli lingkungan. Penelitian ini dilakukan oleh Elka Komala Sari Dewi. Dia menjadikan organisasi lokal Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kelompok Penangkar Swadaya (KPS) RW 03, Kelurahan Rajawati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sebagai studi kasusnya. Dalam risetnya disimpulkan bahwa:

> organisasi lokal tersebut menjadi salah satu contoh gerakan peduli lingkungan. Keberadaan dua organisasi tersebut membawa perubahan bagi masyarakat Rajawati. Program-program lingkungan yang ditawarkan kepada masyarakat memberikan hasil memuaskan. Masyarakat diajarkan mencintai, mengelola lingkungan dan memanfaatkan segala sumber yang ada. [6]

Secara garis besar penelitian yang dilakukan oleh Dewi memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Peran agen sosial yang mengupayakan pemberdayaan masyarakat adalah pengikat keduanya dalam satu kesamaan. Namun, dalam riset yang dilakukan oleh peneliti secara objek riset jelas berbeda. Jika Dewi mengembangkan risetnya dengan PKK dan KPS sebagai studi kasusnya, lain hal dengan peneliti. Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti mengangkat BP3KP sebagai agen yang berperan dalam sosialisasi. Perbedaan kedua agen sosial dalam masing-masing penelitian sangat tampak. Pada riset Dewi, organisasi yang diangkat yaitu bersifat lokal. Kelokalan ini bentuknya jelas bersifat *bottom up*. Masyarakat dengan kebersamaan dan kesadaran membentuk organisasinya

---

[6] Elka Komala Sari Dewi, 2008, *Peran Organisasi Lokal Dalam Menciptakan Masyarakat Peduli Lingkungan*, skripsi sosiologi Universitas Negeri Jakarta (tidak dipublikasikan).

sendiri. Kesadaran organisasi dipupuk secara bersama-sama, sehingga sosialisasi yang dilakukan organisasi akan mudah diterima.

Dari penjelasan organisasi yang diteliti Dewi dapat dilihat perbedaannya dengan peneliti. BP3KP bukanlah organisasi lokal. BP3KKP merupakan lembaga bentukan pemerintah dalam memberdayakan pertanian. Dengan begitu bentuk dari agen ini bersifat *top down*. Pembentukan lembaga berdasarkan kebijakan pemerintah. Sehingga upaya sosialisasi yang terjadi tidak akan sama seperti organisasi lokal pada penelitian Dewi.

Tabel 1.2

Perbedaan dan Persamaan Tinjauan Penelitian Sejenis

No.	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan Pada Balai Penyuluhan Pertanian Di Kabupaten Minahasa (Joice M.J Supit, 2010).	Metode Penelitian kuantitatif, cakupan riset Kabupaten (Minahasa), fokus penelitian kinerja penyuluh pertanian lapangan (PPL).	Objek penelitian yaitu Balai Penyuluhan Pertanian.
2.	Peran Organisasi Lokal Dalam Menciptakan Masyarakat Peduli Lingkungan(Elka Komala Sari Dewi, 2008).	Objek penelitian bersifat lokal (*bottom up).*	Pemberdayaan masyarakat

Sumber: Diolah berdasarkan tinjauan penelitian sejenis, tahun 2011.

F. Kerangka Konseptual

1. Pemberdayaan Masyarakat Petani

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata "dasar 'Daya' yang berarti kekuatan atau kemampuan."[7] Kemampuan ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas manusia dalam meningkatkan dirinya secara kualitas. Peningkatan kualitas diri ini dapat diraih salah satunya dengan jalan pemberdayaan. Stewart dalam Mikkelsen menerangkan bahwa pemberdayaan memiliki tiga definisi.

> *Pertama,* proses menebar dan membangun kemitraan bersama pihak-pihak lain sebanyak mungkin. *Kedua,* mengurangi atau meniadakan atauran, prosedur, perintah dan lain-lain yang dapat menjadi penghambat partisipasi orang atau kelompok untuk bekerja dan berkreasi untuk mengekspresikan diri dalam mencapai tujuan sendiri dan bersama-sama orang lain. *Ketiga,* pemberdayaan tidak menghilangkan kekuasaan, tetapi mengubah cara penggunaan kekuasaan secara tepat dan efektif dilihat dari proses atau hasil yang ingin dicapai.[8]

Secara garis besar dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemberdayaan pada dasarnya mengusung pendidikan sebagai modal utama untuk mengubah masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini, perubahan lebih menitik beratkan pada kemampuan diri masyarakat tersebut. Dengan peningkatan kapasitas masyarakat, sumber daya alam yang ada bisa diimbangi dan dimanfaatkan dengan baik. Dalam proses pemberdayaan terdapat suatu transformasi nilai-nilai baru pada pihak yang diberdayakan. Nilai ini nantinya akan membentuk kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya yang ada.

---

[7] Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan,* Yogyakarta: Gava Media, hlm. 77.

[8] Britha Mikkelsen, 2003, *Metode Penelitian Partisipasif dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 125.

Dalam suatu pemberdayaan di dalamnya, ada pihak yang diberdayakan. Pihak ini biasanya adalah individu atau masyarakat. Pemberdayaan lazimnya menjadikan masyarakat sebagai objek sasarannya. Hal ini karena, lingkup masyarakat lebih memungkinkan mendapatkan keberhasilan yang lebih banyak, dari pada individu yang dapat dihitung jumlahnya. Di Indonesia, program pemberdayaan masih sangat erat kaitannya dengan masyarakat petani. Hal ini karena masyarakat tersebut masih menjadi mayoritas dari penduduk Indonesia. Foster (1953 & 1967) dalam Dunham mendefinisikan masyarakat petani sebagai:

> [Masyarakat petani adalah] sebagian masyarakat… satu bagian dari unit sosial yang lebih luas [biasanya sebuah bangsa] yang terstruktur secara vertikal dan horizontal. Komponen petani dalam unit yang lebih besar ini memiliki hubungan spasial-temporal, simbiotik dengan komponen yang lebih kompleks, yang dibentuk oleh kelas-kelas yang lebih tinggi dari pusat urban preindustrial.[9]

Pemberdayaan masyarakat petani merupakan suatu upaya peningkatan kapasitas diri mereka. Peningkatan kapasitas diri ini akan berfungsi sebagai modal sosial bagi mereka dalam meningkatkan kesejahtraannya. Peningkatan kesejahtaraan ini akan diraih dengan sumberdaya manusia yang dimilikinya dalam mengelola usaha tani. Semakin meningkat sumberdaya yang dimiliki, semakin baik pula pengelolaan usaha tani. Dengan perbaikan tersebut maka kesejahtraan para petani pun dapat tercapai.

Menurut Stewart dalam suatu pemberdayaan terdapat tiga macam kekuasaan dasar yaitu, “kekuasaan peran (*role power*), kekuasaan keahlian (*expert power*), dan

---

[9] S. Ann Dunham, 2008, *Pendekar-pendekar Besi Nusantara: Kajian Antropologi Tentang Pandai Besi Tradisional di Indonesia*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, hlm. 32.

kekuasaan sumber daya (*resource power*)."[10] Ketiga kekuasaan ini akan menunjang suatu pemberdayaan untuk mencapai keberhasilannya. Dalam menerangkan ketiga jenis kekuasaan ini, peneliti akan mengulasnya sebagai analisis pembuka dari pembahasan pemberdayaan masyarakat petani.

Kekuasaan peran (*role power)* merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh pihak pemberdaya untuk memberlakukan sanksi kepada objek sasaran yang diberdayakan. Kekuasaan ini akan berguna supaya pihak yang disebut terajhir ini mau mengikuti perintah-perintah pihak yang pertama. Secara praktis cara ini sewaktu-waktu dapat digunakan, namun bukan pilihan terbaik. Dalam *role power* pencapain pemberdayaan lebih kepada memancing keluar kemampuan yang dimiliki oleh sasaran pemberdayaan. Kepercayaan terhadap pihak yang disebut terakhir dapat menggali kesadaran mereka untuk bertindak mandiri. Dalam pemberdayaan petani, sebisa mungkin pihak pemberdaya memberikan kepercayaan supaya para petani tahu kemampuan yang dimilikinya.

Kekuasaan Keahlian (*Expert Power)* merupakan kewibawaan yang dimiliki oleh pihak pemberdaya (lembaga). Kewibawaan ini tercermin melalui kemampuan yang dimiliki oleh pihak pemberdaya tersebut. Semakin tinggi kecakapan dan pengetahuan pemberdaya atau orang-orang dalam lembaga tersebut, maka semakin diterima dan diikuti program pemberdayaan yang diberikan. Pihak pemberdaya yang memiliki keseriusan dalam meningkatkan kualitas sasaran, dalam hal ini petani,

---

[10] Aileen Stewart, 1998, *Empowering People Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 19.

mereka akan memberikan pemahaman yang sungguh-sungguh supaya sasarannya mau untuk diberdayakan.

Kekuasaan sumber daya (*resource power*) yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga untuk mempersiapkan fasilitas sumber daya. Dalam pemberdayaan petani, lembaga atau pemberdaya memperhitungkan sumber daya apa saja yang harus dimiliki sebelum pemberdayaan itu dilakukan. Pada masyarakat petani tradisional ini sangat penting. Pada masyarakat tersebut ketergantungan ketika pemberdayaan akan sangat kuat. Mereka belum cukup mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, sehingga lembaga menyediakan fasilitas-fasilitas pemberdayaan tersebut. Dengan demikian, para petani bisa terdorong rasa ketertarikannya untuk mengikuti program pemberdayaan.

2. Penyuluhan Pertanian

Konsep penyuluhan pertanian terdiri dari dua suku kata yakni penyuluhan dan pertanian. Kata penyuluhan mulanya dikembangkan oleh Richard Moulton sebagai "suatu metode untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dari Universitas Cambridge kepada warga masyarakat di luar kampus yang tidak mampu mengikuti pendidikan universitas karena keterbatasan biaya atau waktu."[11]

Penyuluhan sebagai terjemahan dari kata *extension* diartikian sebagai "suatu gerakan pendidikan, bimbingan, dan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan

---

[11] L. Suhardiyono, 1989, *Penyuluhan Petunjuk Bagi Penyuluh Pertanian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 1.

oleh lembaga pendidikan tinggi atau/kejuruan menengah bekerjasama dengan instansi pemerintah yang relevan."[12]

Penyuluhan ini memiliki posisi penting dalam masyarakat, khususnya masyarakat dewasa. Penyuluhan yang termasuk kedalam kategori pendidikan dewasa ini berguna sebagai sumber pembelajaran dan pendidikan kepada mereka, supaya memiliki pengetahuan dalam beragam bidang. Penyuluhan ini tidak terikat pada kurikulum ketat seperti sekolah. Penyuluhan lebih bersifat fleksibel dan terbuka bagi masyarakat dewasa.

Kegiatan penyuluhan biasanya terfokus pada beberapa ranah seperti perindustrian, kesehatan, pertanian, dan sebagainya. Dalam hal ini, peneliti akan berfokus pada penyuluhan pertanian karena kajian penelitian ini sendiri mengikat pertanian sebagai salah satu kajiannya. Menurut Pandamanagara dalam Suhardiyono penyuluhan pertanian diartikan:

> sebagai sistem pendidikan di luar sekolah (nonformal) untuk para petani dan keluarganya (ibu tani, pemuda tani, dengan tujuan agar mereka mampu, sanggup dan berswadaya memperbaiki/meningktakan kesejahteraannya sendiri serta masyarakatnya.[13]

Penyuluhan pertanian merupakan suatu upaya pendidikan masyarakat tani yang dilakukan oleh pihak atau lembaga demi memajukan dan meningkatkan kapasitas diri petani sehingga mereka mampu berada dalam kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Penyuluhan sendiri sejatinya merupakan upaya pendidikan. Kegiatan ini sama halnya

---

[12] Suprijanto, 2007, *Pendidikan Orang Dewasa Dari Teori Hingga Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 3.
[13] Suhardiyono, *Op. Cit.*, hlm. 2.

dengan pembelajaran sekolah. Hanya saja penyuluhan lebih condong digunakan sebagai pendidikan orang dewasa, di mana proses pembelajarannya tidak terpaku pada suatu tempat seperti sekolah. Pendidikan ini karena ditujukan sebagai pendidikan orang dewasa, sehingga di dalamnya mengarah pada perubahan perilaku sebagai hasil akhirnya.

Dalam penyuluhan pertanian, hasil yang di dapat nantinya berupa perubahan sikap para petani kearah yang dibentuk. Perubahan sikap atau perilaku ini menentukan berhasil atau tidaknya penyuluhan pertanian itu sendiri. Dalam pendidikan orang dewasa, perubahan perilaku inilah yang menjadi indikator keberhasilannya.

Dengan penyuluhan pertanian, petani diarahkan agar senantiasa memiliki peran aktif dalam membangun dirinya dan masyarakat lainnya. Petani tidak lagi menjadi pihak yang berada di belakang dan mengekor serta menunggu kebijakan bagi kesejateraannya. Dengan penyuluhan pertanian petani bisa menentukan dan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi. Selain itu, mereka pun bisa menjadi aktor utama dalam membangun pertanian dan kesejahteraan golongannya.

Kesejahteraan yang terbangun melalui penyuluhan pertanian dapat mengangkat kualitas dan kesejahteraan petani itu sendiri. Terangkatnya kesejateraan petani ini sekaligus dapat menngembangkan kondisi pertanian yang ada. Munculnya para petani kepermukaan akan mengubah anggapan bahwa pertanian dan petani adalah orang-orang desa yang tersisihkan jaman. Dengan keadaan ini keduanya akan mendapatkan

posisi berbeda di masyarakat, di mana kedua hal tersebut dapat diterima tanpa adanya kecenderungan tersisihkan jaman.

Kesejahteraan petani paling tidak dapat diukur dengan dua indikator. *Pertama,* kesejahteraan tercapai manakala hasil panen para petani dapat meningkat. Peningkatan hasil panen ini turut membawa petani pada keadaan positif. Dengan meningkatnya hasil panen, penghasilan yang mereka raih pun akan meningkat. Maka demikian, peningkatan ini punya posisi penting dalam meraih kesejahteraan petani.

Kedua, kesejahteraan petani juga dapat diukur melalui semakin meningkatnya pengetahuan mereka dalam melakukan kegiatan bertani. Peningkatan pengetahuan ini akan membawa petani pada sisi kreatif mereka dalam mengelola usaha pertaniannya. Jika pada awalnya kegiatan bertani mereka mengalami kondisi yang stagnan, dengan adanya penyuluhan pertanian mereka bisa mengembangkan dan melihat peluang bisnis dari usaha pertanian yang digelutinya.

Variasi bertani yang didapat melalui penyuluhan pertanian, bisa dijadikan modal bagi petani untuk meningkatkan daya jual hasil pertanian mereka. Misalnya saja pada subsektor perekebunan. Jika pada mulanya para petani kebanyakan menjual langsung hasil panennya, dengan mengikuti penyuluhan pertanian ia bisa mengolah hasil panen tersebut terlebih dahulu. Pengolahan ini dapat berguna untuk meningkatkan nilai tambah pada hasil panen tersebut. Sehingga peningkatan nilai tambah tersebut bisa menjadi alat untuk memperoleh ruang usaha yang lebih besar.

Peluang bisnis ini akan mengubah paradigma pertanian yang melekat pada para petani. Paradigma bisnis yang muncul dari sisi kreatif yang diperoleh para petani melalui penyuluhan pertanian ini dapat mendorong mereka dalam menggeluti usaha yang lebih besar. Pandangan meraka akan pertanian tidak lagi sempit tetapi di sini pertanian akan dianggap sebagai usaha yang menjanjikan dan berkeuntungan besar.

G. Metode Penelitian

1. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemakaian pendekatan ini bertujuan agar informasi yang diperoleh lebih mendalam. Jika dilihat dari judul penelitian ini "Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani Desa Panyingkiran", maka pendekatan inilah yang lebih relevan. Relevansi ini dapat dilihat dari pencarian pemahaman yang berada pada informan. Di mana, pencarian pemahaman ini tercermin dari judul itu sendiri. Adapun jenis yang digunakan adalah studi kasus.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang, 6 dari pihak BP3KKP dan 5 orang dari masyarakat Desa Panyingkiran. Informan kunci berasal dari pihak penyuluh yaitu kepala BP3KKP. Selain jumlah tersebut, peneliti pun banyak mendapatkan informasi dari orang-orang yang tidak secara resmi dijadikan sebagai informan. Informasi tersebut didapat melalui obrolan ringan. Adapun informasi yang digali dari narasumber kunci berkisar mengenai jejak sosio-historis serta peranan lembaga dalam perkembangan pertanian di wilayah tersebut. Selain itu,

perkembangan lembaga pun menjadi informasi penting yang digali dari narasumber ini.

Dalam melihat relevansi penyuluhan BP3KKP, Peneliti mempersempit lingkup penelitian dalam satu desa. Hal ini bertujuan agar kajian yang dibahas lebih fokus. Peneliti memilih Desa Panyingkiran sebagai tempat untuk melihat relevansi penyuluhan tersebut. Adapun masalah kewilayahan dan seluk-beluk pertanian yang ada di Desa Panyingkiran ditanyakan pada Informan kedua. Informan ini berasal dari pemerintah desa setempat. Peneliti mencoba mendalami informasi dari narasumber ini. Informan ini sangat membantu peneliti dalam menjabarkan wilayah-wilayah pertanian yang ada di Desa Panyingkiran. Peneliti juga menanyakan apa saja peran BP3KKP dalam membangun pertanian dan memberdayakan para petani di daerah tersebut.

Peneliti juga mewawancarai narasumber dari masyarakat. Masyarakat disini tentunya terspesialisasi sebagai tokoh masyarakat serta petani. Informan ketiga ini menjadi titik refleksi dari gambaran kedua informan sebelumnya. Dari informan ini dilihat bagaimana sosialisasi dari lembaga BP3KKP berjalan. Efektifitas dari penyuluhan yang dilakukan BP3KKP dipertanyakan pada narasumber ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dari riset ini yaitu Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP3KKP) Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lembaga ini dipilih karena peranannya dalam menyosialisasikan pemahaman dan cara-cara bertani modern. Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga

tersebut setidaknya terbentur oleh tiga faktor. Pertama, tingkat pendidikan petani yang relatif rendah. Petani di derah rata-rata adalah generasi tua yang mayoritas hanya mengenyam pendidikan dasar. Kedua, keterdesakan pertanian oleh sektor industrialisasi di sekitar dearah ini. Ketiga, minimnya angkatan muda dalam menyambut pertanian sebagai matapencahariannya. Hal ini memutuskan hubungan pertanian antar generasi. Alasan inilah yang menarik peneliti untuk menjadikan lembaga tersebut sebagai lokasi penelitian.

Selain BP3KKP, Peneliti juga memilih Desa Panyingkiran Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang sebagai lokasi riset. Lokasi ini dijadikan sebagai tempat refleksi dari penyuluhan yang dilakukan oleh BP3KKP. Setidaknya ada dua alasan mengapa lokasi ini dipilih oleh peneliti. Pertama, daerah ini merupakan salah satu daerah pertanian. Mayoritas penduduk daerah ini bekerja di sektor pertanian. Kedua, pertanian yang ada di daerah ini relatif berkembang dengan baik. Masyarakatnya cukup baik dalam merespon sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga penyuluhan.

Adapun tahapan yang dilakukan peneliti yaitu, pengamatan lokasi riset, pendekatan personal terhadap informan, dan eksplorasi informasi. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini sekitar enam bulan yaitu dari bulan Februari hingga September. Pada bulan maret hingga april penelitian ini terhenti. Hal ini karena semangat peneiliti untuk melakukan riset saat itu dalam kondisi buruk. Akhirnya, minggu kedua di bulan april, peneliti mencoba memulai kembali penelitian ini dan berakhir pada bulan September.

3. Peran Peneliti

Pengambilan bahasan mengenai “Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Panyingkiran” awalnya didasarkan pada latar belakang peneliti yang berasal dari keluarga petani. Kenyataan ini akhirnya membawa pada kesadaran tentang pertanian yang ada di daerah asal peneliti. Mulanya, peneliti kebingungan dalam menentukan topik penelitian yang akan dilakukan.

Kesadaran tadi dengan tidak sengaja muncul, hingga menjadi inspirasi bagi peneliti untuk melakukan pengkajian mengenai pertanian. Latar belakang peneliti tadi menjadi modal yang sangat berharga dalam penelitian ini. Terlebih, penelitian ini memiliki setting dan subjek riset yang tidak asing dengan peneliti. Pasalnya, peneliti masih memiliki ikatan kedaerahan dengan kedua aspek yang disebut tadi.

Dalam riset ini, peneliti merupakan peneliti total. Peneliti meskipun memiliki ikatan kedaerahan dan berasal dari kalangan petani, tetapi tidak ada keterlibatan secara mendalam. Peneliti di sini memposisikan sebagai orang luar dari objek riset. Tidak ada keterikatan antara peneliti dengan objek riset tersebut.

Izin dari BP3KKP telah didapat ketika peneliti mendatangi lembaga tersebut untuk melakukan observasi. Peneliti sempat melakukan wawancara dengan salah satu penyuluh yang ada di lembaga itu. Kebetulan pada saat itu Kepala BP3KKP tidak ada di tempat. Namun, peneliti telah memohon izin untuk melakukan riset di lembaga itu.

Untuk perizinan dari Desa Panyingkiran, peneliti tidak kesulitan. Peneliti mendapatkan izin kepala desa setempat untuk melakukan riset di tempatnya.

Perizinan ini merupakan pengantar bagi peneliti dalam melakukan penelitian dan mengakses informan yang berada di wilayah tersebut. Perolehan izin ini sangat penting, mengingat hal tersebut adalah syarat legalitas melakukan riset di tempat itu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan data, primer dan sekuder. Teknik primer yaitu dengan observasi dan wawancara. Adapun wawancara yang dipakai yaitu wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini bertujan untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang ada pada informan terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu secara sekunder yaitu dengan studi pustaka. Studi pustaka digunakan untuk mendukung dan menunjang data lapangan. Dengan demikan, studi pustaka bisa memperkuat data yang diperoleh dari informan. Dengan menggunkan kedua teknik pengumpulan data tersebut, data yang diperoleh menjadi saling menunjang satu sama lain.

Dalam memulai pengambilan data, pertama-tama peneliti mencoba mencari informasi tentang pertanian yang ada di Kecamatan Purwadadi dengan cara berdiskusi dengan petani yang ada di sekitar tempat tinggal peneliti. Dari sini tertujulah satu kesimpulan pada BP3KKP Kecamatan Purwadadi. Kesimpulan ini diputuskan berdasarkan pertimbangan peneliti atas sisi pembelajaran yang diberikan oleh lembaga tersebut pada para petani.

Setelah memutuskan BP3KKP sebagai objek riset, peneliti melakukan observasi dengan cara mendatangi lokasi objek tersebut. Observasi ini ditindaklanjuti

dengan memberitahukan maksud peneliti kepada lembaga itu. Setelah mendapatkan izin dari BP3KKP, peneliti meminta informasi awal daerah mana saja yang menjadi binaan lembaga ini. Dari sinilah didapat Desa Panyingkiran sebagai objek riset kedua dari penelitian ini. Desa ini dijadikan sebagai tempat untuk melihat pelaksanaan kegiatan BP3KKP.

Observasi dan meminta perizinan pun dilakukan pada Desa Panyingkiran. Sebelum melakukan penelitian, peneliti meminta izin kepada kepala desa setempat. Perizinan ini sekaligus memberikan informasi siapa saja informan yang bisa diwawancarai dari pihak masyarakat petani. Adapun pendekatan kepada para informan tersebut tidak bersifat kaku. Hal ini karena keterbukaan mereka terhadap orang asing, termasuk kepada peneliti.

Setelah mendapatkan izin penelitian dari kedua pihak, peneliti melakukan menentukan informan yang akan diwawancara. Peneliti menentukan 11 orang informan, dengan perbandingan 6 orang dari pihak BP3KKP dan 5 orang dari Desa Panyingkiran. Dari kesebelas orang ini saya tentukan informan kunci berasal dari pihak BP3KKP. Setelah menentukan informan, peneliti turun lapangan untuk melakukan wawancara.

Adapun teknik studi pustaka, peneliti jadikan sebagai pendamping peneliti selama pembuatan proposal hingga akhir penulisan penelitian ini. Peneliti memanfaatkan berbagai sumber pustaka yang terkait dengan penelitian. Pemanfaatan sumber pustaka ini memperkaya khasanah berpikir peneliti dalam melakukan riset. Di

samping itu, pemanfaatan sumber pustaka ini pun menunjang data yang ada di lapangan.

5. Teknik Triangulasi Data

Dalam memperkuat data yang diperoleh, peneliti juga melakukan triangulasi data. Moleong memaparkan bahwa triangulasi adalah ”teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.”[14] Peneliti berusaha membandingkan hasil wawancara dari para informan. Peneliti membandingkan hasil wawancara dari pihak BP3KKP dengan hasil wawancara masyarakat Panyingkiran, baik itu dari pihak pemerintahan desa atau pun petani. Peneliti berusaha mencari relevansi apa yang menjadi klaim dan telah dilakukan BP3KKP di desa itu dengan kenyataan sebenarnya. Perbandingan ini dapat menunjukan kesesuaian data yang diperoleh. Kesesuaian data ini menjadi penting untuk mendapatkan otoritas data terkuat.

6. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah proses pengambilan data dilapangan selesai. Peneliti membuat catatan berupa *field note* yang ditulis berdasarkan observasi, wawancara dan studi pustaka. Peneliti mengelompokan data tersebut kedalam beberapa spesifikasi. Pengelompokan ini selanjutnya dinarasikan kedalam tulisan. Narasi ini dipadukan kedalam tulisan dengan kerangka berpikir dan analisis.

---

[14]Lexy J. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 330.

7. Keterbatasan Penelitian

Penguatan data dengan triangulasi meskipun merujuk pada penguatan data, namun tetap saja masih ada kelemahan. Hal ini disadari oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti hanya membandingkan hasil wawancara pada lingkup objek riset. Data yang dipaparkan dalam pembahasan penelitian ini tidak mencapai titik terkuatnya. Hal ini karena beberapa wawancara antar narasumber seringkali melebar dan tidak fokus. Sehingga, peneliti merasa kesulitan dalam menyocokan informasi dari para narasumber. Hal ini pula yang peneliti rasa menjadi keterbatasan dari skripsi ini. Dalam menyikapi hal ini, peneliti mencoba menyiasatinya dengan sumber tertulis yang ada dan terkait dengan pembahasan riset.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi 3 bagian, pendahuluan, isi dan penutup. Dalam tiga bagian itu dibagi-bagi lagi kedalam 5 bab. Bab pertama, berisi latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, tinjauan penelitian sejenis, kerangka konsep dan metodologi penelitian. Dalam bab ini peneliti akan menjabarkan beberapa pertimbangan mengapa mengangkat penelitian ini.

Bab dua, berisi konteks historis Desa Panyingkiran dan BP3KKP Kecamatan Purwadadi. Dalam bab ini dikupas bagaimana latar historis dari lokasi riset. Pertama yang dikupas adalah profil Desa Panyingkiran. Dalam profil tersebut, peneliti menjabarkan konteks sejarah dan kondisi geografis desa. Setelah itu baru kemudian BP3KKP Kecamatan Purwadadi menjadi bahasan selanjutnya. Dalam pembahasannya, peneliti menjabarkan profil dari lembaga tersebut. Ada empat poin

penting yang menjadi isi profil BP3KKP yaitu visi dan misi, tujuan dan sasaran pelaksanaan program, sejarah dan kondisi geografis. Pembahasan bab ini akan menjadi titik awal terlihatnya kemunculan kedua lokasi riset.

Bab tiga, berisi tentang proses peyuluhan pertanian di Desa Panyingkiran. Dalam bab ini dilihat bagaimana kehidupan dan perkembangan masyarakat Panyingkiran dalam keterkaitannya dengan pertanian. Kemudian, pada bab ini juga peneliti menjabarkan penyuluhan yang dilakukan BP3KKP kepada masyarakat Desa Panyingkiran. Peneliti membahas metode yang dipakai oleh lembaga tersebut serta menjelaskan program yang dimilikinya.

Bab empat, penyuluhan pertanian dalam pemberdayaan masyarakat petani Desa Panyingkiran. Pada bagian ini peneliti menganalisis penyuluhan pertanian sebagai upaya pendidikan masyarakat. Pada pembahasannya, peneliti mencoba melihat penyuluhan pertanian yang dilakukan merupakan pendidikan orang dewasa. Pada pendidikan ini lebih menekankan perubahan perilaku sebagai hasil pembelajarannya.

Selanjutnya, pada bab ini pula peneliti mengupas peran BP3KKP dalam pemeberdayaan masyarakat petani Desa Panyingkiran. Bagian ini menjelaskan peran BP3KKP sebagai agen yang melakukan penyuluhan kepada masyarakat Panyingkiran. Selain itu, bagian ini pun menjelaskan bagaimana penyuluhan pertanian bisa dikatakan sebagai upaya pemberdayaan. Proses yang terjadi di sini akan coba dijelaskan melalui konsep pemberdayaan Aileen M. Stewart. Pada bab ini

pula peneliti menulis sebuah catatan refleksi terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Bab Lima, merupakan penutup dari serangkain penulisan penelitian. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari hasil akhir analisis peneliti terhadap penelitian ini. Kemudian saran berisi pandangan dan anjuran peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Peneliti dalam hal ini mengajukan saran kepada empat pihak yakni, BP3KKP Kecamatan Purwadadi, masyarakat petani Desa Panyingkiran, kelompok tani, dan Kementerian Pertanian.